

Penyelenggaraan Dewan Pengujian Keahlian Pelaut ***Holding of Board Testing Expertise of Sailors***

Willem Nikson Sitompul

Puslitbang Perhubungan Laut, Badan Litbang Perhubungan
Jl. Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta Pusat
e-mail: ooo_wills@yahoo.co.id

Naskah diterima 01 April 2014, diedit 21 April 2014, disetujui 30 Mei 2014

ABSTRAK

Pada saat pertumbuhan ekonomi dunia tinggi, berdampak besarnya ekspansi pergerakan muatan yang menggunakan moda transportasi laut. Disisi lain kebutuhan akan kapal juga bertambah, selaras dengan kebutuhan pelaut yang mengoperasikan kapal. Sejak 2002 negara BRICS (Brazil, Rusia, India, China, South Africa), mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Berdasarkan data studi dari Japan *International Transport Institute and Nippon Foundation* pada Mei 2010 menghasilkan: (a) Tahun 2010 permintaan kebutuhan akan pelaut dunia mencapai total 1.093.968 orang; (b) Tahun 2020 kebutuhan pelaut diperkirakan, mencapai total 1.173.004 orang; (c) Kenaikan jumlah kebutuhan pelaut dalam 10 tahun (2010 – 2020) adalah 32.153 orang dan rating 46.881 orang. Sesuai dengan STCW 1978 amendemen 2010 *Section A-I/6 Training and assessment* masing-masing negara anggota STCW harus memastikan, bahwa semua pelatihan dan pengujian pelaut untuk sertifikasi keahlian pelaut dibawah konvensi ini adalah sebagai berikut: (a) Membentuk secara terstruktur dengan program tertulis, termasuk metode dan media pembelajaran, prosedur dan material diklat yang diperlukan untuk mencapai standar keahlian pelaut yang ditentukan; dan (b) Melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi dan mendukung personel yang berkualifikasi sesuai dengan paragraf 4, 5 dan 6. Oleh karena itu kajian penyelenggaraan dewan penguji keahlian pelaut dilakukan. Pendekatan penelitian dengan metode deskriptif eksploratif, dengan pengembangan model evaluasi penyelenggaraan pengujian keahlian pelaut berbasis kompetensi. Hasil penelitian ini usulan pengembangan DPKP yang mandiri dan memiliki otoritas dalam menyelenggarakan pengujian keahlian pelaut yang layak sesuai dengan persyaratan nasional dan internasional, dengan pembenahan manajemen DPKP dari aspek SDM, Sarana dan Prasarana, Sitem pengujian, kualitas penyelenggaraan, kualitas Kepanitiaan, pola pikir dan cara kerja kepanitiaan dan perilaku kerja aparatnya.

Kata Kunci: Penyelenggaraan, DPKP, Pengujian Keahlian, Tenaga Pelaut

ABSTRACT

At the time of high world economic growth , impacting the amount of expansion that uses the movement of cargo marine transportation modes . On the other hand also increased the need for ships , in tune with the needs of sailors who operate the ship . Since 2002 the BRICS countries (Brazil , Russia , India , China , South Africa) , experiencing rapid economic growth . Based on the study data from the Japan International Transport Institute and the Nippon Foundation in May 2010 resulted in : (a) The year 2010 will be a sailor 's needs demand reached a total of 1,093,968 people ; (b) 2020 seaman needs estimated , reaching a total of 1,173,004 people ; (c) An increase in the needs of seafarers in 10 years (2010-2020) was a man officer and rating 46 881 32 153 people . In accordance with the 1978 amendment to the 2010 STCW Section AI / 6 Training and assessment of each country member of the STCW shall ensure that all training and testing sailors for sailors skills certification under this convention are as follows : (a) Establish a structured way with the written programs , including methods and instructional media , procedures and training materials necessary to achieve the prescribed standard of expertise sailors ; and (b) Implement , monitor, evaluate, and support personnel qualified in accordance with paragraphs 4 , 5 and 6 . Therefore, the study of the organization of the board of examiners expertise sailors do . Approach with methods of descriptive exploratory research , the development model of evaluation of competency -based testing expertise sailors . The results of this study DPKP development proposals are independent and have the authority to organize a decent sailor skill testing in accordance with national and international requirements , to improve its management of human resources aspect DPKP , Infrastructures , Openness testing , quality of implementation , the quality of the Committee , the mindset and the way committee work and work behavior agents.

Keywords : Implementation , DPKP , Testing Expertise , Seafarers

PENDAHULUAN

Lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan (diklat) pelayaran dan instansi terkait memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan jumlah dan mutu pelaut yang dibutuhkan pasar. Untuk mewujudkannya dibutuhkan komitmen manajemen DPKP akan tanggung jawabnya bersama lembaga penyelenggara diklat dalam upaya menyediakan tenaga pelaut yg berkualitas, dalam arti pelaut yang memiliki keahlian sesuai dengan kompetensinya dan berperan dalam upaya memenuhi permintaan jumlah tenaga kepelautan yang profesional di sektor pemerintah dan industri pelayaran.

Lembaga pendidikan dan pelatihan harus menjamin terselenggaranya penilaian hasil pembelajaran peserta diklat yang terdiri atas: (a) Penilaian hasil pembelajaran oleh pendidik, yaitu penilaian hasil pembelajaran oleh pendidik terhadap kompetensi yang dicapai oleh peserta diklat meliputi aspek pengetahuan, pemahaman (*kognitif*), sikap (*afektif*) dan keterampilan (*psikomotorik*). Penilaian hasil pembelajaran oleh pendidik dilaksanakan berkesinambungan dengan tujuan memantau proses dan kemajuan pembelajaran yang meliputi penilaian harian, penilaian tengah diklat, penilaian akhir diklat; dan perbaikan hasil penilaian; (b) Penilaian hasil pembelajaran oleh lembaga diklat, yaitu penilaian hasil pembelajaran oleh lembaga diklat adalah penilaian akhir, yang bertujuan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi lulusan guna menentukan kelulusan peserta diklat dari lembaga diklat kepelautan. Atas prestasi pembelajaran peserta diklat yang telah menyelesaikan satuan program diklat kepelautan diberi sertifikat pendidikan dan pelatihan kepelautan (SPPK) sebagai syarat untuk dapat mengikuti ujian kompetensi kepelautan yang diselenggarakan oleh pelaksana ujian keahlian pelaut (PUKP) dibawah pengawasan dewan penguji keahlian pelaut (DPKP); (c) Ujian keahlian pelaut oleh pelaksana ujian keahlian pelaut (PUKP), yaitu Ujian keahlian pelaut adalah ujian kompetensi untuk mendapatkan sertifikat keahlian pelaut bagi peserta diklat dengan metode ujian tulis dan ujian komperhensif oleh PUKP dibawah pengawasan DPKP.[1]

DPKP Direktorat Jendral Perhubungan Laut merupakan lembaga yang mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan Ujian Keahlian Pelaut (mata kuliah profesi) bagi para pelaut. Ujian Keahlian Pelaut harus dijalani oleh taruna sebagai salah satu persyaratan kelulusannya. Apabila ada salah satu mata ujian yang gagal, maka mereka tidak lulus dan diharuskan menempuh ujian perbaikan. Tugas DPKP menguji keahlian taruna ini menunjukkan peran

penting lembaga ini dalam upaya mewujudkan tenaga pelaut pelaut yang memenuhi kebutuhan dan keinginan pengguna. Untuk melaksanakan kegiatan ujian keahlian pelaut dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana mencakup bangunan gedung dan bukan gedung serta fasilitas yang dibutuhkan dalam proses kegiatan pengujian keahlian pelaut. Sementara itu, bangunan kantor DPKP eksisting kurang representatif. Luas bangunan gedung dan ruang-ruang yang di dalamnya belum mencerminkan kebutuhan pelaku kegiatan dalam pelaksanaan ujian keahlian pelaut bagi taruna lulusan lembaga diklat. Untuk mengembangkan kantor DPKP yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan operasional DPKP ke depan diperlukan kajian pengembangan secara intensif. Untuk itu diperlukan kegiatan studi kelayakan dan master plan pengembangan kantor DPKP, yang ditindaklanjuti dengan perencanaan DED.

Keberadaan DPKP di Indonesia bermula dari masa pemerintahan Hindia Belanda yang disebut "*Examen Commissie Voor Stuurlieden Machinisten*" yang dapat diterjemahkan sebagai Panitia Ujian Negara (PUN), yaitu merupakan bagian dari "*Dienst Van Scheepvaart Departement van Marine* yang selanjutnya berubah menjadi "*Departement van Scheepvaart*". Pada masa pemerintahan Republik Indonesia, Departement Van Scheepvaart dirubah menjadi Djawatan Pelayaran yang berada dibawah Kementerian Pekerjaan Umum, Tenaga dan Perhubungan, selanjutnya Djawatan Pelayaran berubah menjadi Direktorat Jendral Perhubungan Laut, yang berada dibawah Departemen Perhubungan, dengan demikian PUN berada di bawah Direktorat Jendral Perhubungan Laut tersebut. Jumlah pendaftar seleksi calon murid dalam diklat transportasi di Indonesia meningkat tiap tahun. Data 3 tahun terakhir BPSDM Perhubungan Laut menunjukkan peningkatan minat masyarakat untuk menjadi ahli transportasi, peminat terbanyak adalah bidang pelayaran. Tahun 2011 peminat sipencatar: 14.542, tahun 2012: 18.061, dan tahun ini peminat berjumlah 22.539 orang.

Pada sektor transportasi laut, pertumbuhan ekonomi tinggi mengakibatkan ekspansi besar terhadap pergerakan muatan menggunakan moda transportasi laut dunia, sehingga menyebabkan kebutuhan akan kapal bertambah, termasuk kebutuhan pelaut yang mengoperasikan kapal. Bila dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dunia sejak 2002 tumbuh pesat khususnya pada negara BRICS (Brazil, Rusia, India, China, South Africa). Berdasarkan data studi dari Japan *International Transport Institute and Nippon Foundation* pada

Mei 2010 menghasilkan data sebagai berikut : (a) Permintaan kebutuhan akan pelaut dunia tahun 2010 adalah perwira/Officer sebanyak 445.055 orang, dan abk/rating 648.914 orang sehingga jumlah kebutuhan total 1.093.968 orang; (b) Tahun 2020 kebutuhan pelaut diperkirakan, perwira/officer 477.208 orang dan abk/ rating 695.795 orang sehingga total kebutuhan 1.173.004 orang; (c) Kenaikan jumlah kebutuhan pelaut dalam 10 tahun (2010 – 2020) adalah officer 32.153 orang dan rating 46.881 orang. Statistik per-Desember 2010 menurut BIMCO (*Baltic and International Maritime Council*) dan ISF (*International Shipping Federation*), jika pertumbuhan jumlah kapal berdasarkan benchmark scenario antara 1,9%-2,7%, maka kekurangan perwira pelayaran niaga berdasarkan demand scenario-back up increased adalah tahun 2010 kurang 12.481 orang, dan tahun 2015 kurang 88.552 orang.[2]

Sesuai dengan STCW 1978 amendemen 2010 Section A-I/6 *Training and assessment* masing-masing negara anggota STCW harus memastikan, bahwa semua pelatihan dan pengujian dari pelaut untuk sertifikasi keahlian pelaut dibawah konvensi ini adalah sebagai berikut: (a) Membentuk secara terstruktur dengan program tertulis, termasuk metode dan media pembelajaran, prosedur dan material diklat yang diperlukan untuk mencapai standar keahlian pelaut yang ditentukan; dan (b) Melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi dan mendukung personel yang berkualifikasi sesuai dengan paragraf 4, 5 dan 6.

Berpijak pada uraian di atas hal tersebut, Dewan Pengujian Keahlian Pelaut (DPKP) teridentifikasi belum memiliki kemampuan berperan dalam upaya memenuhi permintaan jumlah tenaga kepelautan yang profesional di sektor pemerintah dan industri pelayaran, maka dibutuhkan DPKP yang solid dan kuat untuk mengantisipasi adanya pemenuhan kebutuhan dalam hal pengujian kompetensi keahlian pelaut dimasa yang akan datang dan memiliki struktur organisasi dan perkantoran yang layak sesuai dengan persyaratan nasional dan internasional. Sehingga tujuan kajian ini untuk mendapatkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan pelaksanaan penyelenggaraan Dewan Pengujian Keahlian Pelaut (DPKP), selama ini. Dengan demikian dapat dijadikan perbaikan yang akan menghasilkan kepercayaan di sektor pemerintah dan industri pelayaran, bahwa dari hasil pengujian keahlian pelaut, dapat menyediakan tenaga pelaut yang professional dan berkualitas.

METODE

Penelitian ini merupakan dasar dalam pengembangan model evaluasi yang diawali oleh

studi pendahuluan yang mencari data awal berupa model implementasi evaluasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif eksploratif.[3] Sebagaimana diketahui, bahwa model evaluasi yang digunakan adalah mengacu pada model penyelenggaraan pengujian keahlian pelaut berbasis kompetensi. Maka aspek yang dinilai terhadap kinerja penyelenggara antara lain; (a) efektivitas penyelenggaraan; (b) kesiapan dan ketersediaan sarana diklat; (c) kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana; (d) kebersihan kelas; (e) ketersediaan dan kelengkapan bahan diklat; (f) ketersediaan laboratorium komputer; (g) ketersediaan fasilitas olah raga, kesehatan dan ibadah; (h) pelayanan terhadap peserta dan pengajar; (i) administrasi diklat antara lain; (j) tingkat piñata usaha diklat; (k) ketersediaan sistem informasi diklat; (l) penilaian kinerja penyelenggaraan dilakukan oleh peserta dan tenaga; (m) pelaporan kepada instansi pembina.[4]

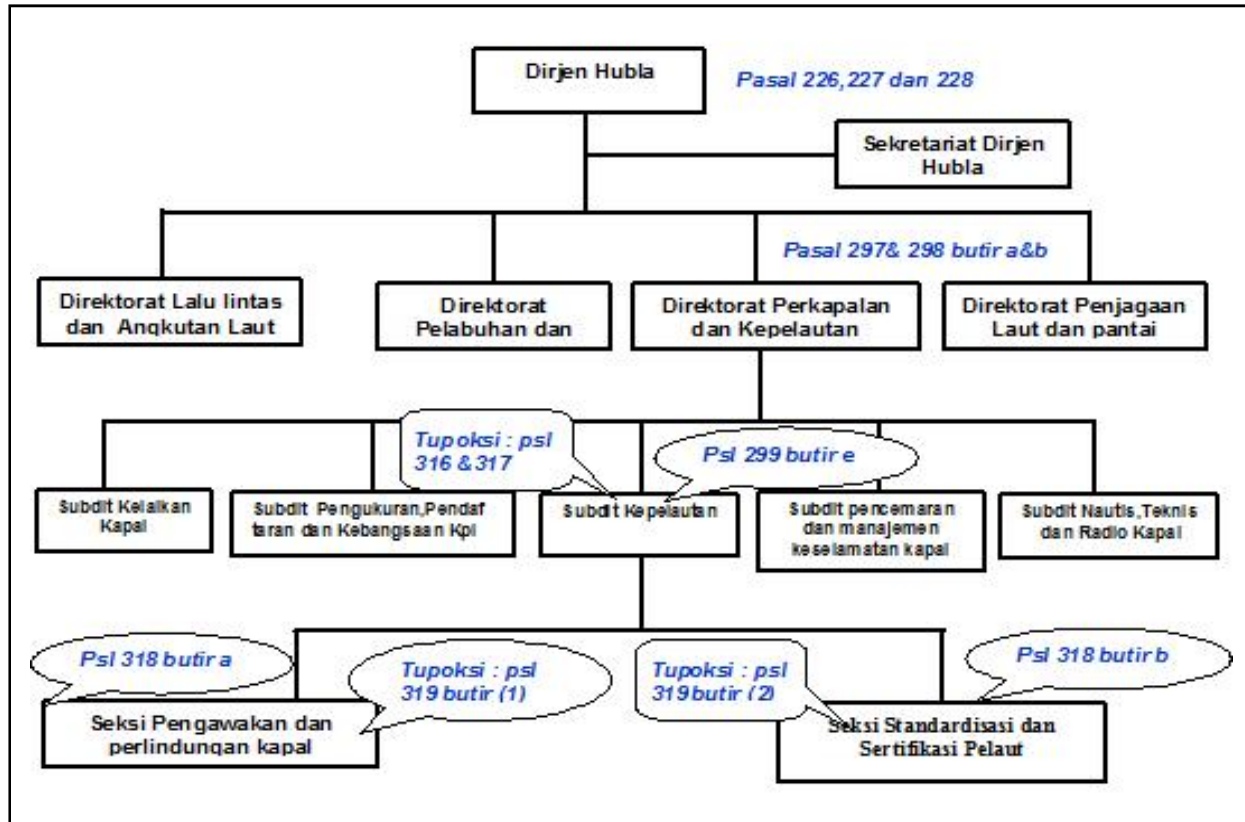
HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan dewan pengujian keahlian pelaut (DPKP), secara formal sebagai pelaksana penyelenggaraan pengujian keahlian pelaut: Lokasi, di Jalan Medan Merdeka Timur, Kota Jakarta Pusat. DPKP merupakan lembaga penyelenggara Ujian Keahlian Pelaut dan secara teknis ujian dilaksanakan oleh PUKP yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai lembaga mandiri, dan bertanggung jawab kepada Dirjen Perhubungan Laut. DPKP menjalankan aktifitasnya di Jalan Medan Merdeka Timur No. 5 Jakarta. Payung hukum, landasan kegiatan DPKP berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 60 th 2010, tentang Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kedudukan, Tugas dan Fungsi dan pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut.

Hubungan keberadaan DPKP dengan kebijakan tersebut, menggambarkan kelemahan DPKP sebagai penyelenggara ujian keahlian pelaut, karena: (a) penyelenggaraan dan pengawasan ujian keahlian pelaut dilaksanakan oleh Direktur Jenderal; (b) sistem dan prosedur ujian keahlian pelaut di tetapkan oleh Direktur Jenderal; (c) Dirjen Perhubungan laut membentuk Dewan Penguji Keahlian Pelaut (DPKP) , yang diketuai oleh Direktur yang membidangi Kepelautan; (d) monitoring penyelenggaraan diklat dilaksanakan secara bersama oleh Direktur Jenderal dan Kepala Badan. Dengan demikian dapat disimpulkan keberadaan DPKP saat ini: (a) Dewan Penguji Keahlian Pelaut yang dibentuk

oleh Direktur Jendral (PM 70 Th 2013) tetapi kedudukannya dibawah Seksi standarisasi dan Sertifikasi(merujuk pada PM 60 Th 2010); (b) Ruang Lingkup DPKP sangat luas, akan tetapi DIPA nya sangat kecil, karena posisinya dibawah Seksi Standarisasi dan Sertifikasi; dan (c) kondisi anggaran dan SDM yang terbatas di DPKP;[5]. Secara organisasi penjelasan tadi dapat dilihat pada gambar 1.

Sarana Dan Prasarana, pendukung pelaksanaan tugas DPKP, saat ini tertuang dalam tabel 1. Dukungan Dana/Pembiayaan, Untuk melaksanakan kegiatan UKP, sebagian kecil anggarannya dialokasikan melalui DIPA yang ada di Ditkappel, dan sebagian besar dibebankan kepada masyarakat yang mengikuti UKP. Sehingga terjadi pungutan dan pengelolaan dana dari masyarakat yang dilakukan



Gambar 1. Struktur Organisasi Ditjen Perhubungan Laut

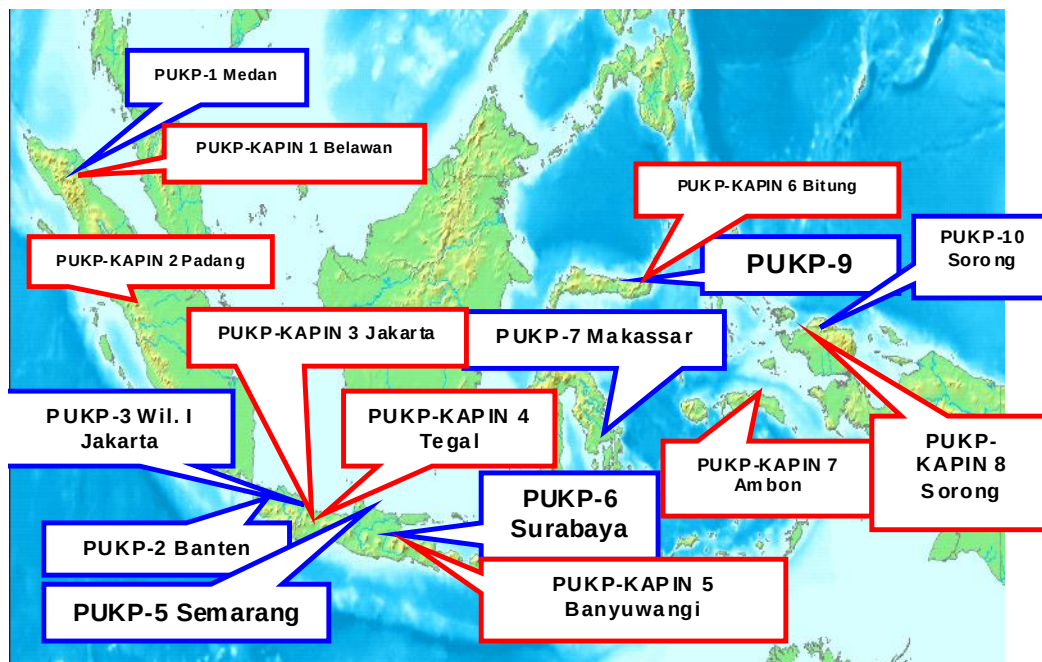
Potensi Sumber Daya Manusia, sebagai penyelenggara dan Panitia Ujian Keahlian Pelaut (PUKP), sebagai pelaksana Ujian Keahlian Pelaut (UKP) di daerah organisasinya hanya dibentuk dengan SK Ditjen Hubla, sementara personilnya berasal dari berbagai UPT yang berbeda. Belum jelas sistem pengukuran dan pengawasan kinerjanya, remunerasi pegawai, Karena bukan organisasi struktural atau fungsional Kemenhub, tidak ada skema audit yang dilakukan oleh SPIP Kemenhub kepada DPKP dan PUKP. Kemudian tidak ada jenjang karir karena hanya tugas tambahan di luar instansi kerja dan system penggajian/remunerasi yang jelas. Dengan penjelasan di atas, keberadaan potensi Sumber Daya Manusia DPKP dapat disimpulkan saat ini: kinerja personel tidak terukur sehingga hasilnya kurang profesional dan kurang dapat di pertanggung jawabkan.[6]

oleh PUKP di daerah yang Pegawai diangkat dengan SK Kepala DITJEN HUBLA. Program Pelayanan DPKP, penyelenggaraan ujian keahlian pelaut (UKP) meliputi : (a) Dewan Penguji Keahlian Pelaut menyelenggarakan Ujian Keahlian Pelaut 4 (empat) kali dalam 1 periode ujian, 1 kali (ujian lengkap) dan 3 kali (ujian ulangan) untuk masing-masing tingkat kompetensi; (b) Ujian Keahlian Pelaut Niaga dilaksanakan 10 (sepuluh) wilayah PUKP; (c) Ujian Keahlian Pelaut Kapal Penangkap Ikan dilaksanakan 4 kali dalam 1 tahun (lengkap/ulangan) yang dilaksanakan 10 PUKP KAPIN (gambar 2)

Tabel 1.
Sumber Daya Sarana dan Prasanana

No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah
1.	Gedung Kantor Jl.Medan Merdeka Timur No.5 Jakarta Pusat	1 unit Lantai 1 Kondisi Terbatas
2.	Transportasi - Kendaraan Roda 4 - Kendaraan Roda 2	Tidak Ada
3.	Mesin-mesin Kantor a. Komputer b. Mesin Ketik Manual c. Mesin Ketik Elektronik d. LCD e. Laptop f. Telpon g. Faximili h. Genset	3 unit 2 unit 2 unit 1 unit Tidak Ada 1 unit 1 unit Tidak Ada
4.	Peralatan Kantor Lainnya a. Meja dan Kursi kerja b. Meja belajar c. Kursi besi d. Sentral Telpon e. File Cabinet f. Sound System g. AC	8 set (lama) Tidak ada Tidak Ada Ada (dikelola bersama unit kerja lain) 8 unit (lama) Tidak Ada 3 unit (Tidak terawatt)
5.	Ruang Kelas Auditorium Ruang Laboratorium Ruang Perpustakaan Ruang Diskusi Ruang seminar	2 unit (terbatas) Tidak ada Tidak Ada Sangat Terbatas Sangat Terbatas
6.	Ruang Penguji Kamar Mandi Ruang Istirahat/Makan/Minum Lemari Buku/Penyimpanan	1 Kamar (Sangat Terbatas) Sangat Terbatas Tidak Ada Tidak Ada

Sumber Data: DPKP



Sumber Data: DPKP

Gambar 2. Wilayah Ujian PUKP dan PUKP KAPIN

Tabel 2.
Lokasi Wilayah Ujian PUKP dan PUKP KAPIN

No	PUKP	Lokasi/Wilayah	Tingkat Sertifikat
1.	I	Aceh & Medan	ANT/ATT-III, ANT/ATT-IV, ANT/ATT-V, ANT/ATT-D
2.	II	BP2IP Tangerang/Banten	ANT/ATT-III, ANT/ATT-IV, ANT/ATT-V, ANT/ATT-D
3.	III	STIP Jakarta (Wilayah I Jakarta)	ANT/ATT-I, ANT/ATT- II, ANT/ATT-III,
4.	IV	BP3IP Jakarta (Wilayah II Jakarta)	ANT/ATT-V s/d I, ANT/ATT-D
5.	V	PIP Semarang	ANT/ATT-IV s/d II
6.	VI	Poltek Pel Surabaya	ANT/ATT-D s/d III
7.	VII	PIP Makasar	ANT/ATT-III s/d II
8.	VIII	BP2IP Barombong	ANT/ATT-D, ANT/ATT-V/IV
9.	IX	Bitung	ANT/ATT-III Dibawah pengawasan PUKP VII
10.	X	Sorong	ANT/ATT-D, ANT/ATT-V/IV
No.	PUKP KAPIN	Lokasi/Wilayah	Tingkat Sertifikat
1.	I	Belawan	Tingkat I/II/III
2.	II	Periaman	Tingkat I/II/III
3.	III	Jakarta	Tingkat I/II/III
4.	IV	Tegal	Tingkat I/II/III
5.	V	Banyuwangi	Tingkat I/II/III
6.	VI	Bitung	Tingkat I/II/III
7.	VII	Ambon	Tingkat I/II/III
8.	VIII	Sorong	Tingkat I/II/III
9.	IX	Pontianak	Tingkat I/II/III
10.	X	Aceh	Tingkat I/II/III

Sumber Data: DPKP

Pelaksanaan penyelenggaraan pengujian keahlian pelaut oleh DPKP, sesuai amanah *Standard Training Certification And Watch Keeping* (STWC) 1978 amendemen 2010 *section a-i/6training and assessment*. Hal ini menunjukkan kemandirian pelayanan pengujian keahlian pelaut, bukan semata-mata sebagai formalitas pelaksana, namun memiliki tanggungjawab yang cukup besar. Evaluasi kinerja DPKP selaku penyelenggaraan ujian keahlian pelaut menunjukkan:

Kinerja inputs dalam pelayanan DPKP : (a) bahwa dengan tugas sebagai penyelenggara pengujian keahlian pelaut yang materinya dipayungi oleh kebijakan internasional dari IMO seperti STCW 1978, amandemen 1995 dan ketentuan Manila 2010, dan kebijakan nasional Undang-undang republik Indonesia Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi serta Dinas Jaga Laut, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 60, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dapat dikatakan tidak berjalan dengan maksimal dengan perencanaan yang matang sebagai unit kerja yang mandiri (sifatnya SDM nya tidak terstruktur dan tidak permanen); (b) Ruang ujian

yang digunakan seharusnya dilengkapi dengan beberapa perlengkapan ujian keahlian pelaut sebagai penunjang proses ujian yang memadai. Standar minimal ruang ujian tidak terpenuhi, jadi sangat terbatas bila ada peserta ujian yang ingin ujian di DPKP Jakarta. Dimaksud antara lain: meja/kursi, lemari, *overhead projector*, layar OHP, LCD, jam dinding, mimbar, alat tulis menulis (ATK), Papan tulis, mesin pendingin (AC), papan tulis, Flip Chart, TV & CD Player, alat perekam (*Recorder*), komputer, jaringan *akses internet*, sound system, sarana komunikasi internal (interkom) sebagai komunikasi dengan peserta ujian, termasuk perpustakaan, ruang kerja panitia penyelenggara, poliklinik, sarana parkir; (c) bahwa input sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan pengujian keahlian pelaut dapat dikatakan tidak tertata secara manajemen, padahal DPKP melakukan penyelenggaraan ujian keahlian pelaut sifatnya seperti unit kerja mandiri tetapi tidak mandiri, dan semua input sarana dan prasarana yang dibutuhkan tidak terfasilitasi dengan optimal. Hal ini sangat riskan bila terjadi komplain dari peserta dan institusi pendidikan pelaut yang mengirim peserta bila terjadi hal yang tidak terduga, yang diyakini tidak tuntas pemecahan atau solusinya; (d) bahwa input fasilitas penunjang meliputi Penyediaan Bahan Ujian,

Sistem Seleksi dan Metode Pengujian, dalam mendukung penyelenggaraan pengujian keahlian pelaut dapat dikatakan tidak tertata secara manajemen, padahal komponen-komponen tersebut sangat penting bagi DPKP. Sedangkan DPKP sendiri hanya pelaksana saja tidak ikut campur dalam manage penyediaan bahan ujian sampai dengan pelaksanaannya.[7] Sehingga dengan demikian tidak jelas siapa yang bertanggungjawab dalam menangani penyelenggaraan ujian keahlian pelaut secara utuh dan buat apa DPKP itu sebenarnya.??

Kinerja Proses, Secara makro penetapan standar penyelenggaraan ujian keahlian pelaut seharusnya mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Dirjen Perhubungan laut dan pelaksanaannya oleh Kepala Pengembangan SDM Perhubungan, di mana secara operasional dilaksanakan oleh DPKP

pada tahap-tahap penyelenggaraan ujian keahlian pelaut. Harusnya Kinerja proses dalam pelayanan pengujian keahlian pelaut melalui tahapan-tahapan: Tahap Persiapan, Tahap-Pelaksanaan Kegiatan, Ujian, dan Sertifikasi. Namun pada kenyataannya petugas yang ada di DPKP tidak memahami tahapan proses penyelenggaraan ujian keahlian pelaut, mulai dari tahapan persiapan sampai dengan ujian dan sertifikasinya. Dalam hal ini yang dikerjakan hanya melakukan pengujian, mengumpulkan menyediakan waktu persiapan hasil rapat pengujian dan mengumumkan hasil ujian dan bagaimana mendapatkan sertifikasinya.[8]

Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Penyelenggaraan Pengujian Keahlian Pelaut Oleh DPKP, dengan hasil pengukuran Kinerja Penyelenggaraan DPKP, meliputi beberapa aspek yang tertuang dalam tabel 3 dan tabel 4.

Tabel 3.
Capaian Kinerja Inputs Penyelenggaraan Pengujian

No	Indikator Kerja & Unsur	aspek	Total Per Total	Nilai Rata- Rata Capaian
1.	Inputs	69.07	(sedang)	
	Pegawai	55		235
	SDM	Penguji	91	78.33
		Panitia Penyelenggara	89	Baik sekali
	Sarana dan Prasarana	Ruang Ujian	50	
		Ruang Perpustakaan	53	256
		Sarana Parkir	50	51.20
		Poliklinik	50	Kurang
		Ruang Fasilitas Lainnya	53	
	Sistem Pengujian	Bahan/Materi Ujian	89	224
		Inventarisasi Peserta	85	74.67
		Metode pengujian	50	Baik

Sumber Responden SMK Baramuli Airmadidi, BP3TKI, Pelaut Manado

Tabel 4.
Capaian Kinerja Proses Penyelenggaraan Ujian

No	Indikator Kerja & Unsur	aspek	Total Per Total	Nilai Rata- Rata Capaian
2.	Proses	83.21	(baik)	
	Jenis Pelayanan Ujian	81		
	Pelanggan	91		
	Administrasi	Identifikasi Harapan peserta ujian	79	570
		Teknik Pengarahan	84	81
		Persiapan Ujian		
		Komunikasi Persiapan	80	
		Jadwal Ujian		
		Kelengkapan bahan ujian	83	
		Prosedur	79	
		Persiapan	84	
		Penyelenggaraan Ujian		
		Pelaksanaan Ujian	83	425
	Penyelenggara	Pemeriksaan /Evaluasi	79	8500
		Pengumuman kelulusan	89	Baik
		Sertifikasi	90	

Sumber Responden SMK Baramuli Airmadidi, BP3TKI, Pelaut Manado

Tabel 5.
Capaian Kinerja Output Penyelenggaraan Ujian

No	Indikator Kerja & Unsur	aspek	Total Per Total	Nilai Rata- Rata Capaian
3.	Keluaran Nilai Akhir	6357 Sikap dan Perilaku Penyelenggara	Kurang 60	60
	Administrasi	Pelayanan Pemanggilan peserta	86	Kurang
	Nilai Penyelenggara	Pelayanan Penerimaan Peserta	86	
		Pelayanan Administrasi	53	67.14
		Pelayanan Administrasi	50	
		Pelayanan kesehatan Sakit	50	kurang
		Pelayanan konsumsi ujian	53	
		Pelayanan penyediaan ruang ujian	53	

Sumber Responden SMK Baramuli Airmadidi, BP3TKI, Pelaut Manado

Tabel 6.
Capaian Kinerja Outcomes Penyelenggaraan Ujian Untuk Pola Pikir & Cara Kerja Panitia/Pegawai DPKP

Pemanfaatan			
Kognitif	Pola pikir & cara kerja	modus	
Nilai Panitia	Sinergitas	4	baik
	Menjalankan peran	4	baik
	Orientasi berpikir	4	baik
	Kesadaran pelayanan inovatif	2	Tidak baik
		2	Tidak baik
		Skor dominan	
		4	baik

Sumber Responden SMK Baramuli Airmadidi, BP3TKI, Pelaut Manado

Dari analisis hasil penelitian tabel 3 sd 7, diketahui tingkat capaian kinerja pelayanan akademik: (a) Kinerja Inputs = 68.07 (Sedang); (b) Kinerja Proses = 83.21 (Baik); (c) Kinerja Outputs = 63.57 (Kurang); (d) Kinerja Outcomes : untuk pola pikir & cara kerja= Baik ; untuk perilaku kerja= Kurang Baik. Dengan demikian keberadaan DPKP sebagai lembaga yang menyelenggarakan ujian keahlian pelaut sesuai amanah *Standard Training Certification And Watch Keeping (STWC) 1978* amendemen 2010 *section a-i/6 training and assessment* tidak memungkinkan mencapai mutu penyelenggaraan yang handal karena hamper keseluruhan komponen manajemen penyelenggaraan tidak terfasilitasi dibandingkan misi yang diembannya.[9]

Rekomendasi Aspek-Aspek Yang Dapat Dijadikan Pengembangan DPKP Sebagai Lembaga Pengujian Keahlian Pelaut Yang Mandiri Pada Waktu Akan Datang Beberapa aspek yang dapat

direkomendasikan kepada unit kerja Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, sebagai penyempurnaan pengembangan organisasi DPKP, sebagai berikut:

Rekomendasi Pertama

Menjadikan DPKP sebagai lembaga independen pengujian keahlian pelaut Indonesia, yang dalam hal ini memerlukan kajian tersendiri, dan ini banyak melibatkan semua pihak mengingat aturan yang memayungi persyaratan keahlian pelaut secara internasional dikeluarkan oleh IMO (*International Maritime Organization*), dalam hal ini STCW 1978, amandemen 1995 dan manila amandemen 2010, dan kebijakan nasional berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. 60 th 2010, tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. 70 Tahun 2013, tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi serta Dinas jaga Laut.[10]

Tabel 7.

Capaian Kinerja Outcomes Penyelenggaraan Ujian Untuk Perilaku Kerja Panitia/Pegawai DPKP

Pemanfaatan			
Afektif & psikomotorik Respon peserta ujian	Perilaku kerja		
	Komitmen	4	Baik
	&konsistensi		
	Wewenang &tanggung jawab	5	Sangat baik
	Keikhlasan dan kejujuran	5	Sangat baik
	Integritas dan profesionalisme	2	Kurang baik
	Kreatifitas dan kepekaan	2	Kurang baik
	Kebersamaan dan dinamika	2	Kurang baik
	Ketepatan dan kecepatan	2	Kurang baik
	Rasional dan kecerdasan emosi	2	Kurang baik
	Keteguhan dan ketegasan	2	Kurang baik
	Disiplin dan keteraturan kerja	3	Kurang baik
	Dedikasi dan loyalitas	2	Kurang baik
	Semangat dan motivasi	4	Baik
	Ketekunan dan kesabaran	3	Cukup baik
	Keadilan dan keterabukaan	3	Cukup baik
	Menjalankan peran	3	Cukup baik
	Orientasi berfikir	3	Cukup baik
	Kesadaran pelayanan	4	Baik
	Total	51	Kurang baik

Sumber Responden SMK Baramuli Airmadidi, BP3TKI, Pelaut Manado

Rekomendasi Kedua

Pembenahan dan penambahan aspek-aspek yang mempengaruhi pengembangan DPKP(rekomendasi pertama),[11] yang tertuang dalam tabel 8.

KESIMPULAN

Status Kinerja DPKP sebagai penyelenggara pengujian keahlian pelaut Indonesia, selama ini hanya sebagai pelaksana persiapan ujian, yang segala sesuatu manajemen pengaturannya tidak dilaksanakan oleh DPKP tetapi, yang membawahi DPKP sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor. 60 th 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. 70 Tahun 2013, tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi serta Dinas jaga Laut. Namun melihat bahwa pengujian keahlian

pelaut Indonesia dipayungi oleh aturan internasional dari IMO dalam STCW 1978, amandemen 1995 dan manila amandemen 2010, maka DPKP selaku penyelenggara pengujian keahlian pelaut Indonesia sangat rentan daslam mempertanggungjawabkan output kinerjanya, karena DPKP hanya sebagai pelaksana sehingga bila ada komplain yang berkaitan dengan ujian keahlian pelaut tidak memiliki kewenangan untuk menjawabnya, dan selalu tidak terjawab, ini tidak sesuai dengan aturan STCW di atas sebagai payung hukum kepelautan.

Hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan DPKP menunjukkan: (a) Kinerja inputs terdiri dari unsur SDM, Sarana dan Prasarana, dan sistem pengujian, secara umum mencapai rata-rata 68.07 (Sedang), dengan unsur inputs SDM mencapai rata-rata 78.33 (Baik Sekali), hanya di aspek pegawai 55.00 (kurang). Unsur inputs Sarana dan Prasarana mencapai rata-rata 51.20 (kurang), dengan semua rincian kinerjanya

Tabel 8.

Rekomendasi aspek-aspek yang dapat dijadikan pengembangan DPKP sebagai lembaga pengujian keahlian pelaut yang mandiri

No	Indikator Kinerja & Unsur	Rekomendasi Pertama: Menjadikan DPKP Sebagai Lembaga Independen Penyelenggaraan Pengujian Keahlian Pelaut Indonesia	Rekomendasi Kedua : Aspek Yang Perlu Dibebanahi Dan Ditambahkan Untuk Melengkapi Rekomendasi Pertama Yaitu:	
			Aspek-Aspek Yang Dipertahankan Dengan Tetap Menjadikan DPKP, Lembaga Independen Penyelenggaraan Pengujian Keahlian Pelaut Indonesia (Perlu Kajian Tersendiri)	Aspek-Aspek Yang Menjadi Prioritas Dalam Perencanaan Kebutuhan Pengembangan DPKP Menjadi Lembaga Independen Penyelenggaraan Pengujian Keahlian Pelaut Indonesia (Perlu Kajian Tersendiri)
1	INPUTS			
	SDM	Penguji	V	
		Panitia Penyelenggara	V	
		Pegawai		V
	Sarana dan Prasarana	Ruang Ujian		V
		Ruang Perpustakaan		V
		Sarana Parkir		V
		Poliklinik		V
		Ruang Fasilitas Lainnya		V
		Metode pengujian		V
	Sistem Pengujian	Bahan /Materi Ujian	V	
		Inventarisasi Peserta	V	
2	PROSES			
	Administrasi	Jenis Pelayanan Ujian	V	
		Pelanggan	V	
		Identifikasi harapan peserta ujian	V	
		Teknik Pengarahan Persiapan Ujian	V	
		Komunikasi Persiapan jadwal ujian	V	
		Kelengkapan bahan ujian	V	
		Prosedur	V	
	Penyelenggaraan	Persiapan Penyelenggaraan Ujian	V	
		Pelaksanaan Ujian	V	
		Pemeriksaan/Evaluasi	V	
		Pengumuman kelulusan	V	
		Sertifikasi	V	
3	KELUARAN			
	Nilai Akhir	Sikap & Perilaku Penyelenggara	V	
	Nilai Penyelenggaraan	Pelayanan Pemanggilan Peserta	V	
		Pelayanan Penerimaan Peserta	V	
		Pelayanan Pelaksanaan Ujian	V	
		Pelayanan Administrasi		V
		Pelayanan Kesehatan Sakit		V
		Mendadak		V
		Pelayanan Konsumsi Ujian		V
		Pelayanan Penyediaan Ruang Diskusi		V
4	PEMANFAATAN			
	Pola Pikir & Cara kerja			
	Kognitif	Sinergitas	V	
		Menjalankan Peran	V	
		Orientasi Berfikir	V	
		Kesadaran Pelayanan		V
		Inovasi		V
	Perilaku Kerja			
	Afektif & Psikomotorik	komitmen dan konsistensi	V	
		wewenang & tanggung jawab	V	
		keikhlasan dan kejujuran	V	
		disiplin dan keteraturan kerja	V	
		semangat dan motivasi	V	
		ketekunan dan kesabaran	V	
		keadilan dan keterbukaan	V	
		Menjalankan peran	V	
		Orientasi berfikir	V	
		kesadaran pelayanan	V	
		integritas & profesionalisme		V
		kreativitas dan kepekaan		V
		kebersamaan dan dinamika kerja		V
		ketepatan dan kecepatan		V
		rasionalitas dan kecerdasan emosi		V
		keteguhan dan ketegasan		V
		dedikasi dan loyalitas		V

Sumber : Output Hasil pengolahan Data dan Informasi Responden

kurang. Unsur Sistem pengujian mencapai rata-rata 74.67 (Baik), dengan rincian metode pengujian 50.00 (Kurang); (b) Kinerja proses terdiri dari unsur administrasi dan penyelenggaraan, secara umum mencapai rata-rata 83.21 (Baik) (Sedang), dengan unsur proses administrasi dengan rinciannya mencapai rata-rata 81.43 (Sedang). Unsur proses penyelenggaraan dengan rinciannya mencapai rata-rata 85.00 (Baik); (c) Kinerja keluaran terdiri dari unsur nilai akhir dan nilai penyelenggara, secara umum mencapai rata-rata 63.57 (Kurang), dengan unsur keluaran nilai akhir dengan rincian sikap dan perilaku penyelenggara, mencapai rata-rata 60.00 (Kurang). Unsur keluaran nilai penyelenggara dengan rincian Pelayanan Pemanggilan Peserta, Pelayanan Kesehatan Sakit Mendadak, Pelayanan Konsumsi Ujian, Pelayanan Penyediaan Ruang Diskusi mencapai rata-rata 67.14 (kurang); (d) Kinerja pemanfaatan terdiri dari unsur pola pikir dan cara kerja dan perilaku kerja, secara umum untuk unsur pemanfaatan pola pikir dan cara kerja mencapai skor dominan 4 (Baik), di mana pada rincian kesadaran pelayanan dan inovasi masing-masing mencapai skor 2 (Tidak baik). Unsur pemanfaatan perilaku kerja mencapai rata-rata 51.00 (Kurang Baik), di mana pada rincian integritas & profesionalisme, kreativitas dan kepekaan, kebersamaan dan dinamika kerja, ketepatan dan kecepatan, rasionalitas dan kecerdasan emosi, keteguhan dan ketegasan, disiplin dan keteraturan kerja, dedikasi dan loyalitas, masing-masing mencapai skor 2 (Kurang Baik).

Beberapa aspek yang mempengaruhi DPKP dalam menyelenggarakan pengujian keahlian pelaut, dapat teridentifikasi kelemahan pada beberapa aspek: (a) SDM pada kelemahan Pegawai, (b) Sarana dan Prasarana pada kelemahan dari Ruang Ujian, Ruang Perpustakaan, Sarana Parkir, Poliklinik, Ruang Fasilitas Lainnya, (c) sistem pengujian pada kelemahan metode pengujian, (d) Nilai penyelenggaraan pada kelemahan Pelayanan Pemanggilan Peserta, Pelayanan Kesehatan Sakit Mendadak, Pelayanan Konsumsi Ujian, Pelayanan Penyediaan Ruang Diskusi, (e) Pola pikir dan Cara Kerja penyelenggaraan ujian, yaitu pada kelemahan kesadaran pelayanan dan inovasi, (f) Perilaku Kerja pada kelemahan integritas & profesionalisme, kreativitas dan kepekaan, kebersamaan dan dinamika kerja, ketepatan dan kecepatan, rasionalitas dan kecerdasan emosi, keteguhan dan ketegasan, disiplin dan keteraturan kerja, dedikasi dan loyalitas.

Rekomendasi yang didapat dalam kajian ini yang intinya menjadikan DPKP sebagai lembaga independen pengujian keahlian pelaut Indonesia, yang

dalam hal ini memerlukan kajian tersendiri. Demikian juga pembenahan dan penambahan aspek-aspek yang mempengaruhi pengembangan DPKP nantinya.

Saran-saran yang diberikan dalam penelitian ini yaitu: Berkaitan dengan kebutuhan tenaga pelaut Indonesia di dalam dan di luar negeri, maka keberadaan DPKP sudah waktunya menjadi lembaga penyelenggara pengujian keahlian pelaut Indonesia yang permanen (semua dilakukan secara mandiri) oleh DPKP, dalam hal ini kebijakan yang terkait dengan itu perlu ditinjau ulang apakah masih mendukung untuk pengembangan DPKP atau perlu adanya payung hukum tersendiri. Pimpinan yang membawahi unit kerja DPKP, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut, dalam rangka usulan pengembangan DPKP yang mandiri, maka dapat menindaklanjuti pembenahan manajemen DPKP dari aspek SDM, Sarana dan Prasarana, Sistem pengujian, kualitas penyelenggaraan, kualitas Kepanitiaan, pola pikir dan cara kerja kepanitiaan dan perilaku kerja aparatnya.

Melaksanakan pembenahan dan penyempurnaan atas beberapa temuan kelemahan beberapa aspek yang mempengaruhi kinerja DPKP dengan menyampaikan usulan TOR pengembangan DPKP secara komprehensif kepada Menteri Perhubungan untuk dimasukkan dalam program kerja Kementerian Perhubungan.

Disarankan adanya kajian lanjutan dengan tema pengembangan DPKP menjadi lembaga Mandiri Pengujian Keahlian Pelaut dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaut di dalam dan di luar negeri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Mengucapkan terima kasih kepada Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut, Dewan Redaksi serta dari Dewan Pengujian Pengujian Keahlian Pelaut, Ditjen Perhubungan Laut

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Zainul, Asmawi dan Noehi Nasution. *Penilaian Hasil Belajar*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2001. Jakarta;
- [2] Kajian Akademis DPKP Ditjenhubla No. Dokumen: KI/DPKP/01, Revisi: 00, Tgl. Efektif: 11 Desember 2013. Jakarta;
- [3] Arikunto, Prof. Dr. Suharsimi (2000), *Manajemen Penelitian*, Edisi Baru, Cetakan ke V, Jakarta: PT Rineka Cipta; Jakarta;
- [4] Budiandono, D. (1986), *Perencanaan dan Penyelenggaraan Latihan Tenaga Kerja*, Jakarta: Penerbit Bhataara Karya Aksara, Jakarta.;
- [5] Debra L. Nelson dan Cary L. Cooper. *Positive Organizational Behavior*. London SAGE Publications, 2007. London;

- [6] Dale A. Timpe (1982), *Kinerja, Seri Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT Elex Media Komputindo Jakarta;
- [7] Husein Kosasih, Drs. H. (2004) *Teknik Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Satuan Organisasi/Kerja di Lingkungan Departemen Agama, Modul Diklat AKIP/LAKIP*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Keagamaan Pusdiklat Administrasi, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta;
- [8] Indonesia, MENPAN, *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/01/M.PAN/01/2007, Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja Pada Instansi Pemerintah*, Jakarta;
- [9] William M.Lindsay dan Joseph A. Petrick. *Total Quality And Organizational Development*. Dalray Beach-florida: St. Lucia, 1997.
- [10] Penyelenggaraan, <http://artikata.com/arti-377296-penyelenggaraan.html> (diakses 25 Juli 2014)
- [11] Atmodiwirio, Soebagio, (1993), *Manajemen Training, Pedoman Praktis Bagi Penyelenggara Training*, Cet.1, Balai Pustaka, Jakarta.

